

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi indikator utama dalam menilai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Prihadi, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan, yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan yang telah dihasilkan harus memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Hasil dari laporan keuangan selanjutnya disampaikan kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana tuntutan publik bahwa suatu keharusan organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah (Andi dkk, 2022).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjadi penting untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan sendiri merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, jika pemerintah berpedoman langsung dari SAP dalam penyusunan laporan keuangan daerah, maka hal tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Sherina, 2023). Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Aprilia, Ikyarti (2019) menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Reswari dan Nazir (2022) bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara profesional dan akurat. Kompetensi SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan. SDM yang terampil dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang relevan. SDM yang kompeten dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kinanda, dkk (2022) menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sriyono, dkk (2020) menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel (Sari, 2022). Konsep *good governance* menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan keuangan publik yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Faishal Agung dan Sri Mulyani (2020) menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta penelitian yang dilakukan Putri Dwi Rahmadani dan Nurfitri Zulaikha (2023) menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2022. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemko Lhokseumawe 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajaran ini dilihat dari 4 unsur yaitu pertama bagaimana penerapan SAP, efektifitas sistem, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun demikian tanpa mengurangi keberhasilan

yang telah dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah, BPK menemukan beberapa permasalahan, meskipun permasalahan tersebut tidak secara material mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, permasalahan tersebut antara lain: (1) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 tidak realistis mengakibatkan timbulnya utang belanja dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya yang akan membebani anggaran tahun berikutnya; (2) Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium dan membebani keuangan daerah; dan (3) Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan Belanja Modal pada lima SKPK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Data tersebut disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD Kota Lhokseumawe dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhoseumawe?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhoseumawe?
3. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Good Governance*, serta kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Sebagai media praktik dan studi banding antar teori yang telah diperoleh dalam kuliah dengan praktik aktual yang diterapkan pada pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, penelitian ini dapat menambahkan Pengetahuan peneliti, terutama mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe”.

b) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi karyawan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang kualitas laporan keuangan yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

c) Bagi Pihak Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi dunia pendidikan, khususnya bagi perguruan tinggi dan juga bagi peneliti selanjutnya.